

OPTIMALISASI SENTRALITAS ASEAN DALAM RANGKA MENGHADAPI ISU KEAMANAN KAWASAN SAAT INI DAN DI MASA DEPAN

Nurliwedie Nurdin Kanan¹

Rira Nuradhawati²

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani

nurliwedie427@gmail.com

rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multilateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multilateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multilateral di dalam asosiasi untuk menangani masalah keamanan. Motivasi lain yang menguatkan ASEAN membentuk ARF adalah keinginan anggotanya untuk lepas dari ikatan ketergantungan terhadap Cina, Jepang, dan Amerika. Demikian juga dengan terbentuknya ASC tidak dimaksudkan untuk menggagas suatu pakta pertahanan atau aliansi militer seperti NATO. ASC dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional guna memberantas terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multilateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multilateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya.

Kata Kunci : kerjasama, keamanan, bilateral, ASEAN

Abstract

At present, bilateral security cooperation is deemed insufficient to deal with increasing regional interdependence and the scope of security uncertainty in southeast Asia. This led to the creation of a multilateral promotion proposal. In the end ASEAN decided to form the ARF (ASEAN Regional Forum) as a form of multilateralisation due to several motivations such as, the region experiencing

environmental changes that would pressure ASEAN countries to question their regional security. Therefore we need a multilateral cooperation within the association to deal with security issues. Another motivation that strengthened ASEAN to form the ARF was the desire of its members to break free from dependence on China, Japan and the United States. Likewise, the formation of the ASC was not intended to initiate a defense pact or military alliance such as NATO. ASC was formed with the aim of strengthening national and regional capacity to eradicate terrorism and other transboundary crimes.

In this regard, at present, bilateral security cooperation is deemed insufficient to deal with increasing regional interdependence and the scope of security uncertainty in southeast Asia. This led to the creation of a multilateral promotion proposal. In the end ASEAN decided to form the ARF (ASEAN Regional Forum) as a form of multilateralisation due to several motivations such as, the region experiencing environmental changes that would pressure ASEAN countries to question their regional security.

Keywords: *cooperation, security, bilateral, ASEAN*

PENDAHULUAN

Perkembangan politik internasional dan regional mengalami perubahan yang besar sebagai dampak dari berakhirnya Perang Dingin. Beberapa konflik yang belum terselesaikan di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara seperti konflik Laut China Selatan juga mempengaruhi kedinamikaan kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara. Jatuhnya USSR, bangkitnya negara-negara seperti Cina, India, Jepang dan reorientasi kebijakan luar negeri AS karena defisit anggaran menyebabkan AS, meskipun menjadi superpower pada saat itu, secara bertahap harus mengurangi basis militernya di kawasan Asia Tenggara (Philiphina), dan melahirkan persepsi tentang kekosongan kekuatan atau “*power vacuum*”.¹ Dampaknya ialah ketakutan di antara negara-negara ASEAN terhadap Cina yang bangkit sebagai negara yang kuat dari aspek militer dan ekonomi, dan dilihat akan mengambil keuntungan dari “*power vacuum*” tersebut. Bersamaan hal tersebut, tentunya menimbulkan ancaman terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara. ASEAN adalah organisasi regional yang berada pada kawasan Asia Tenggara. ASEAN yang lahir pada 8 Agustus 1967, lewat KTT I di Bali tahun

¹) Dewi Fortuna Anwar, “Changes and Continuity In Indonesia’s Regional Outlook”, dlm Chandran Jeshurun, (penyt.), Cina, India, Japan and The Security of Southeast Asia (Singapore: ISEAS, 1993), hlm. 226

1976 melahirkan suatu Declaration of ASEAN Concord (dikenal sebagai Bali Concord I) yang sepakat untuk bekerja sama di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan. Tetapi pada perkembangannya, lingkup kerjasama yang menjadi fokus ASEAN lebih pada hubungan ekonomi dan sosial budaya, sedangkan masalah keamanan terkesan dikesampingkan. Barulah setelah terjadi banyak peristiwa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, dibentuklah suatu rezim keamanan secara khusus untuk melindungi kawasan ASEAN dari berbagai ancaman, seperti dibentuknya ASC setelah terjadinya banyak aksi peledakan bom di kawasan Asia Tenggara. Dan ARF yang merupakan upaya multilateralisasi ASEAN untuk melindungi keamanan kawasannya bersama-sama dengan negara-negara Asia Pasifik.

Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multilateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multilateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multilateral di dalam asosiasi untuk menangani masalah keamanan. Motivasi lain yang menguatkan ASEAN membentuk ARF adalah keinginan anggotanya untuk lepas dari ikatan ketergantungan terhadap Cina, Jepang, dan Amerika. Demikian juga dengan terbentuknya ASC tidak dimaksudkan untuk menggagas suatu pakta pertahanan atau aliansi militer seperti NATO. ASC dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional guna memberantas terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Di samping itu, ASC juga harus berfungsi memberikan jaminan agar kawasan Asia Tenggara terbebas dari senjata pemusnah masal. Apabila terjadi perbedaan di kawasan yang dapat mengarah pada konflik, maka ASC harus dapat meredam perbedaan itu agar tidak menimbulkan konflik, pertentangan, atau bahkan peperangan. Perbedaan antarnegara harus bisa diselesaikan secara damai. Hal ini juga harus disertai

pandangan bahwa keamanan setiap negara saling terkait secara mendasar yang terikat oleh letak geografis, visi, dan tujuan bersama ASEAN. Namun sekarang tergantung bagaimana kemampuan ASEAN untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan negara besar itu dalam sebuah kerangka kerjasama yang menguntungkan, tentunya berkaitan dengan kontribusinya terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Menyikapi hal tersebut, yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam penulisan ini adalah : 1) Sejauhmana berbagai tantangan ASEAN saat ini dan masa depan, bagaimana Indonesia dan ASEAN menghadapi tantangan tersebut ?; Mengapa terjadi perbedaan sikap dari berbagai negara ASEAN atas perkembangan di Laut China Selatan, bagaimana langkah Indonesia dan ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan (LCS) pasca keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional (PAI)?; dan 3) Sejauhmana perkembangan kerjasama regional dalam membangun arsitektur regional di Kawasan Asia Tenggara, bagaimana Indonesia dan ASEAN menjawab perkembangan itu ?.

Berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : bagaimana mengoptimalkan sentralisasi ASEAN dalam rangka menghadapi isu keamanan kawasan saat ini dan di masa depan ?

Berpijak kepada rumusan masalah diatas, penting untuk dikaji lebih mendalam, karena adanya cetak biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025 yang ditujukan untuk memajukan ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat (*people-oriented, people-centered*) di semua sektor kemasyarakatan. Terlepas dari jender, ras, agama, bahasa, atau latar belakang sosial budaya, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses integrasi dan pembangunan Masyarakat ASEAN. Dalam pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, isu-isu strategis dan kerjasama politik-keamanan yang dipandang strategis oleh Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster, yaitu isu keamanan kawasan, pemberantasan kejahatan lintas negara, keamanan maritim, serta hukum dan hak asasi manusia. Beberapa hal yang mengemuka

dalam masalah keamanan kawasan antara lain isu Laut Cina Selatan (LCS) dan pembangunan arsitektur kawasan.

Adapun metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam rangka mendeskriptifkan data dan fakta yang tersedia yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Pada KTT ASEAN 1997, para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu mengeluarkan pernyataan tentang “Visi ASEAN 2020”. Melalui visi tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempererat kesatuan dan integrasi ekonomi serta memutuskan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara lain dengan “menerapkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dan mempercepat liberalisasi perdagangan”. Penguatan usaha pencapaian visi ini, Indonesia pada KTT ASEAN ke-9 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 7-8 Oktober 2003 dengan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (*ASC-ASEAN Security Community*).

Pencetusan Bali *Concord II* pada KTT ke-9 berisi tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASSC). Antisipasi perubahan global, pada KTT ke-12 dilakukan percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari 2020 menjadi 2015 dan disepakati oleh para Kepala Negara ASEAN.

Komunitas ASEAN 2015 terbagi dalam 3 pilar, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Sebelum itu, dihadapkan dengan berbagai ancaman yang timbul di kawasan Asia Pasifik, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, khususnya Indonesia mengusulkan untuk membentuk ASEAN Regional Forum sebagai jawaban penanggulangan dan penanganan terhadap ancaman kawasan. Namun kedua forum kerjasama tersebut dirasakan kurang memberikan kontribusi yang positif terhadap negara-negara anggotanya, terlebih masuknya AS, China, Jepang, Australia dan negara-negara besar lainnya, akan menimbulkan dampak negatif di

masa depan. Sehingga perlu mencari solusi dan sikap dari negara-negara anggota ASEAN dalam rangka meminimalisir faktor-faktor isu keamanan kawasan.

Tantangan ASEAN saat ini dan dimasa depan serta peran Indonesia dan ASEAN menghadapi tantangan tersebut.

Mencermati latar belakang diatas, data dan fakta yang dapat penulis rangkum adalah pada tahun 2015 negara-negara ASEAN berupaya memperbaharui visi Masyarakat ASEAN dan berupaya untuk mempercepat implementasi *integrasi regional* dalam tiga wilayah kerjasama, yaitu politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya sampai tahun 2025. ASEAN juga menghadapi berbagai tantangan saat ini dan ke depan, yaitu ASEAN perlu menjadi stabilisator regional yang independen dan efektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan Timur, ASEAN harus pasti mempertahankan peranannya dan sentralitasnya dalam pembentukan arsitektur di Asia Tenggara dan Timur yang saat ini sedang berevolusi, negara-negara ASEAN perlu menaruh perhatian kepada berbagai efek sosial, krisis politik dan ekonomi di tingkat regional bisa meningkatkan nasionalisme di masing-masing negara ASEAN, pelambatan ekonomi global dan perlu meningkatkan institusional dialog antara negara-negara ASEAN. Saat ini peran Indonesia dan ASEAN ke depan akan menghadapi tantangan untuk menjaga dan mempertahankan sentralitas dan kesatuan ASEAN. Tanpa kesatuan dan sentralitas, peran ASEAN di kawasan dan dunia dapat menjadi kurang relevan. Untuk itu, komunikasi diantara para menteri luar negeri ASEAN semakin ditingkatkan, baik melalui jalur formal maupun informal. Kita harus terus menjaga dan memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN, dan jangan sampai kawasan ASEAN menjadi '*proxy*' bagi negara-negara besar.

Menindaklanjuti data dan fakta diatas, diharapkan Indonesia dan ASEAN dapat menjadi stabilisator regional yang independen dan efektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan Timur, ASEAN harus pasti mempertahankan peranannya dan sentralitasnya dalam pembentukan arsitektur di Asia Tenggara dan Timur yang saat ini sedang berevolusi, negara-negara ASEAN

perlu menaruh perhatian kepada berbagai efek sosial, krisis politik dan ekonomi di tingkat regional bisa meningkatkan nasionalisme di masing-masing negara ASEAN, pelambatan ekonomi global dan perlu meningkatkan institusional dialog antara negara-negara ASEAN.

Berdasarkan data dan fakta serta kondisi yang diharapkan, dapat dianalisa bahwa dalam menghadapi isu keamanan kawasan, Indonesia dan ASEAN harus dapat menghadapi berbagai tantangan pada saat ini maupun tantangan baru di masa depan agar bisa terus menjadi organisasi regional yang berhasil. Terkait hal itu, Indonesia dan ASEAN harus terus dapat mengelola situasi dengan menghormati prinsip-prinsip dasar dan hukum internasional serta menjaga hubungan baik dengan semua pihak.

Indonesia dan ASEAN juga harus dapat mengatasi berbagai tantangan yang datang dari ancaman kejahatan transnasional dan terorisme. Untuk itu, pentingnya untuk ASEAN meningkatkan kerjasama, baik di tingkat regional maupun subregional. Kunci dari keberhasilan ASEAN ke depan akan ditentukan dari kemampuannya untuk memastikan rakyat ASEAN merasakan hasil dari pembangunan yang dicapai ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN ke depan akan menghadapi tantangan untuk menjaga dan mempertahankan sentralitas dan kesatuan ASEAN. Tanpa kesatuan dan sentralitas, peran ASEAN di kawasan dan dunia dapat menjadi kurang relevan. Untuk itu, komunikasi diantara para menteri luar negeri ASEAN semakin ditingkatkan, baik melalui jalur formal maupun informal. Kita harus terus menjaga dan memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN, dan jangan sampai kawasan ASEAN menjadi '*proxy*' bagi negara-negara besar.

Peran Indonesia dan ASEAN dalam menghadapi isu keamanan kawasan dapat mengoptimalkan dibentuknya ASEAN Regional Forum (ARF), dimana merupakan forum yang dibentuk ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Peserta ARF berjumlah 27 negara yang terdiri atas seluruh

negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina), 10 negara Mitra Wicara ASEAN (Amerika Serikat, Kanada, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) serta beberapa negara di kawasan yaitu: Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan, Timor-Leste, Bangladesh dan Sri Lanka

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan diatas, masih menuai berbagai kendala yang salah satunya adalah sentralisasi ASEAN yang mengalami persengketaan diantara sesama negara anggota maupun antar negara-negara non anggota, yang berusaha mencegah akan eskalasi persengketaan itu menjadi konflik kawasan.

Sehingga, upaya-upaya peran Indonesia dan ASEAN yang dapat dilaksanakan antara lain : 1) Indonesia dan ASEAN perlu memastikan sentralisasi ASEAN. Indonesia memiliki peran dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN. Ini dilakukan Indonesia dengan memprakarsai dikeluarkannya *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region* pada Juli 2016²; 2) Mengoptimalkan Cetak Biru Masyarakat Politik-Kemanan ASEAN yang terdiri atas tiga karakteristik utama, yaitu: Masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma (*a rules based community with shared values and norms*); Kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif (*a cohesive, peaceful and resilient region with shared responsibility for comprehensive security*); dan Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar (*a dynamic and outward looking region*)³; 3) Mengoptimalkan perwujudan Masyarakat Politik-Kemanan ASEAN didasarkan pada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti Piagam ASEAN, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN*), Traktat Persahabatan dan

² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/180000369/peran-indonesia-di-asia-tenggara?page=all>

³ https://kemlu.go.id/portal/i/read/121/halaman_list_lainnya/masyarakat-politik-keamanan-asean

Kerja Sama Negara-Negara ASEAN (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*), dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ*) termasuk Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya⁴.

Perbedaan sikap negara ASEAN atas perkembangan di LCS dan langkah Indonesia serta ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas LCS pasca keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional (PAI)

Data dan fakta yang dapat penulis rangkum bahwa isu Laut China Selatan, setelah menarik perhatian dunia pada tahun 2009, saat China untuk pertama kalinya secara resmi memperkenalkan peta dengan sembilan garis putus (*Nine-Dash Line*), konflik di wilayah tersebut terus tumbuh, ketegangan antara pihak-pihak yang berkepentingan memanas.

Konflik bertambah parah saat China mengabaikan keputusan pengadilan internasional dalam gugatan tahun 2016 terhadap klaim China. Pada tanggal 13 Juli 2016, China mengeluarkan Kertas Putih untuk merespon keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional tetapi tidak lagi menyinggung Sembilan garis putus⁵. Seluruh Menteri luar negeri ASEAN menyatakan keprihatinan serius atas perkembangan situasi LCS. Alasannya, kehadiran dan militerisasi China di LCS. China manaruh rudal anti serangan udara HQ-9 di pulau Woody di Kepulauan Paracel dan mereklamasi karang menjadi pulau artifisial di Kepulauan spartly dan paracel.⁶

Amerika Serikat (AS) secara terbuka mempermasalahkan kehadiran China diperairan yang disengketakan tersebut. AS berharap kebebasan melewati perairan dan udara di LCS. Menteri Pertahanan AS Ash Carter bicara di Kongres AS tentang rencana China mereklamasi gugusan karang Scarborough Shoal di perairan sengketa antara Filipina dan China yang dapat meningkatkan ketegangan di sana. AS berharap penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dengan cara diplomasi dan damai. Pertengahan Juni 2016, AS menambahkan kekuatannya

⁴ Ibid

⁵ Kompas (2016) "Manusia Perlu Muka, Pohon Perlu Kulit" Kompas Cetak, 13 Juli, hal 8

⁶ Kompas (2016) "ASEAN menyatakan keprihatinan" Kompas Cetak, 29 Februari, hal 10

Armada 7 untuk Asia Pasifik (140.000 marinir/pelaut), 200 kapal dan 1.200 pesawat) dengan Armada 3 (100 kapal dimana 4 kapal induk didalamnya) dengan tujuan melakukan patroli dan melindungi kebebasan navigasi di LCS⁷.

Untuk itu, diharapkan Indonesia dan ASEAN dapat membentuk forum dialog yang berkaitan dengan keamanan kawasan LCS. Hal ini mengingat masih adanya berbagai isu strategis terkait dengan keengganan China mematuhi keputusan PAI. Terbentuknya *ASEAN Regional Forum* (ARF) dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menangani dan menanggulangi segala bentuk ancaman di kawasan LCS khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.

Menindaklanjuti hal diatas, dapat dianalisa bahwa peran Indonesia dan ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas LCS pasca keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional dapat mengoptimalkan terbentuknya ARF. Karena kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multilateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (*ASEAN Regional Forum*) sebagai bentuk multilateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multilateral di dalam asosiasi untuk menangani masalah keamanan. Motivasi lain yang menguatkan ASEAN membentuk ARF adalah keinginan anggotanya untuk lepas dari ikatan ketergantungan terhadap Cina, Jepang, dan Amerika⁸. ARF adalah kelompok diskusi multilateral yang fokus pada dialog guna menentukan dan membangun langkah awal kerjasama keamanan. ARF sendiri adalah perjanjian pertama keamanan yang dibuat pada level regional Asia-Pasifik. ARF menyediakan kesempatan pada regional untuk mendiskusikan pandangan keamanan mereka yang berbeda dan mengintegrasikan negara terisolasi kedalam sistem keamanan

⁷ Kompas (2016) "AS Perbesar kekuatan di LCS" Kompas Cetak, 16 Juni, hal 9

⁸ Ralf Emmers, "Regimes for Cooperative Security: The Formation and Institutional Evolution of ASEAN and the ARF" dalam buku *Cooperative Security and The Balance of Power in ASEAN and The ARF*. New York, 2004, pp.10-39

regional. ARF mendorong perubahan pola konstruksi hubungan antara kekuatan utama dengan kepentingan dalam region. Atau dengan kata lain ARF telah menjadi alat pegangan dalam iklim hubungan keamanan regional.

Dilihat dari agenda dan perkembangan ARF, forum ini telah berkembang lebih dari sekadar forum untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan secara resmi forum ini telah membicarakan pembentukan tata regional baru di Asia Pasifik. Meski demikian, sebagai forum dialog keamanan multilateral dan pembangunan kepercayaan di kawasan Asia Pasifik, selain diharapkan dapat membuka jalan bagi mediasi berbagai persoalan yang dihadapi negara-negara ASEAN, ARF diharapkan mampu mengupayakan tatanan internasional yang adil agar tidak ada dominasi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dalam hubungan internasional.

Masalah terorisme merupakan tantangan fundamental ASEAN dan menjadi ancaman paling menakutkan di dunia karena dapat mengancam wilayah manapun, termasuk di luar ASEAN. Maka ASEAN harus mengambil sikap tidak membenarkan siapa pun yang melakukan teror. Tindakan menumpas pendukung dan pelaku teror harus menjadi komitmen negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Meski demikian, ARF sebagai forum kerja sama keamanan di Asia Pasifik belum dapat dijadikan jaminan sebagai sarana satu-satunya yang mampu mengatasi masalah keamanan di Asia Pasifik⁹.

Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut dirasakan masih terdapat beberapa kendala dan kelemahan diantaranya adalah belum adanya keselarasan yang ingin dicapai oleh ASEAN dan ARF maupun belum adanya aksi nyata tentang terbentuknya ASEAN Concord yang telah di gagas oleh Indonesia beberapa waktu lalu di KTT ASEAN di Bali. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi dari seluruh negara ASEAN dalam rangka mengoptimalkan keberadaan ARF dalam membantu keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Mencermati latar belakang diatas, maka upaya-upaya yang dapat dilaksanakan antara lain : 1) Melaksanakan formulasi pengembangan konsep

⁹ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/29/ln/519490.htm> dalam artikel "Pertaruhan Komunitas Keamanan ASEAN"

kerjasama regional ASEAN, untuk mendapatkan manfaat hasil kerjasama yang lebih baik bagi negara anggota ASEAN; 2) Mengoptimalkan pertemuan-pertemuan kerjasama ASEAN, dalam rangka penyempurnaan rumusan-rumusan kesepakatan kerjasama ASEAN. Secara structural bentuk pertemuan yang dilaksanakan dalam kerjasama ASEAN seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Sidang Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN, Sidang Menteri-menteri Ekonomi ASEAN, Sidang Menteri-menteri Sektoral ASEAN, Sidang Gabungan Para Menlu dan Menteri Ekonomi, Sekertaris Jenderal ASEAN, Panitia Tetap ASEAN dan Sidang Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN; 3) Menyeleraskan tujuan terbentuknya ARF dengan aksi deklarasi *ASEAN Concord Vision 2020* dengan mempertimbangkan Asia Tenggara yang bersatu dalam suatu ikatan sebagai “*a community of caring societies*”; 4) ASEAN harus menggelar aksi Deklarasi *ASEAN Concord*, yang merupakan sebuah komunitas akan mempercepat kerjasama dalam pembangunan social yang ditujukan guna meningkatkan standar kehidupan kelompok yang dirugikan dan penduduk pedesaan, dan akan mencari keterlibatan aktif semua sector masyarakat, khususnya kaum wanita, pemuda dan komunitas local.

Perkembangan kerjasama regional dalam membangun arsitektur regional di Kawasan Asia Tenggara dan peran Indonesia serta ASEAN menjawab perkembangan tersebut.

Berdasarkan data dan fakta yang ada, dapat penulis himpun bahwa pembangunan arsitektur kawasan, Indonesia dan ASEAN perlu memperkuat evolusi arsitektur regional untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas Kawasan. ASEAN perlu menjadi stabilisator regional yang netral dan independen. ASEAN perlu menyeimbangkan kepentingan regional dan global saat berhubungan dengan berbagai mitranya dari Asia dan Pasifik serta Kawasan lain. ASEAN memegang peran penting dalam pembangunan arsitektur kelembagaan di tingkat kawasan.

Negara-negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN menyadari peran penting ASEAN dalam membantu penciptaan kelembagaan dan proses yang

memberikan ruang bagi negara-negara anggotanya dan negara-negara di kawasan untuk menangani masalah secara damai. Dengan pengakuan ini, ASEAN telah mengukuhkan diri sebagai “inti pemersatu kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik”. Peran ASEAN dalam mencapai stabilitas di kawasan telah memberikan jaminan bagi negara-negara anggota ASEAN serta mitranya di kawasan bahwa ASEAN memiliki karakteristik yang tenang dan ramah serta berkomitmen terhadap prinsip tidak ikut campur tangan (*non-interference*) dalam politik dalam negeri negara lain¹⁰. Pada tahun 2020 ini, ASEAN akan mengadakan konferensi untuk membentuk Masyarakat Keamanan ASEAN (ASC) sebagai bentuk partisipasi negara-negara ASEAN dalam menjaga keamanan di kawasan.

Oleh sebab itu, diharapkan terbentuknya masyarakat keamanan ASEAN (ASC) mampu memberikan program-program yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi dan menangani isu keamanan kawasan maupun kejahatan lainnya di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASC harus menjadi barometer bagi negara-negara di kawasan regional untuk memerangi terorisme internasional dalam rangka membentuk keamanan di berbagai kawasan. ASC harus membentuk konsensus nyata di antara negara-negara anggotanya, karena adanya kepentingan domestik yang berbeda-beda di negara-negara anggota dirasakan dapat membuat seluruh program ASC ini akan menjadi bias.

Dihadapkan dengan hal tersebut, dapat dianalisa bahwa ASEAN kini dihadapkan pada berbagai isu keamanan regional yang jauh lebih rumit dan lebih luas. Selama ini agenda isu keamanan kawasan didominasi oleh berbagai isu keamanan konvensional /tradisional (konflik teritorial, perlombaan senjata) di beberapa wilayah seperti Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, namun kini agenda keamanan regional juga disibukkan berbagai persoalan keamanan non tradisional. Secara lebih spesifik, isu-isu keamanan non tradisional ini sering pula disebut sebagai "fenomena wilayah abu-abu"/FWA.

Fenomena ini, sebagaimana dikemukakan Peter Chalk, secara luas dimaknakan sebagai ancaman-ancaman terhadap stabilitas sebuah negara yang

¹⁰ Naskah Departemen MP. Kerja sama Keamanan Kawasan, Kep Danseskoad Nomor Kep/120/XII/2019 tgl 11 Desember 2019, hal. 61

berasal dari proses-proses non pemerintah yang dilakukan oleh aktor non-negara. Berdirinya ASC ternyata tidak memberikan respon dari beberapa negara anggotanya, dimana hal ini menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya ASC dalam melindungi masyarakat ASEAN. Seperti contohnya, kasus kekerasan di Myanmar merupakan tantangan pertama bagi kebijakan non intervensi dalam masalah dalam negeri negara anggota ASEAN.

Masalah Myanmar bisa membuat ASEAN dinilai negatif karena ASEAN akan dianggap mendukung sebuah rezim yang tidak menghormati HAM, sehingga muncul kesan walaupun pembentukan ASEAN didasarkan pada ikatan biografis, kesejarahan dan budaya di Asia Tenggara, pada kenyataannya pendorong utama regionalisme ASEAN lebih banyak ditentukan oleh keinginan untuk menjamin regime survival. Sampai munculnya *ASEAN Charter* 2007, semua negara anggota ASEAN masih menganggap bahwa prinsip non intervensi sangat penting bagi hubungan antar bangsa.

Oleh karena itu, bila penghargaan atas HAM dan Demokrasi dapat dipatuhi oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai bagian dari pemahaman baru keamanan non konvensional yaitu *human security*. Respon yang bersikap keras dari Malaysia, Filipina, dan Singapura sempat mengarah pada wacana pemberian sanksi pada Myanmar, sekalipun mekanisme semacam itu belum pernah di atur. Dimasa depan, perlu dipikirkan pemberian sanksi kepada negara-negara anggota ASEAN yang dianggap tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

ASEAN bisa dinilai sebagai sebuah organisasi yang mendukung sebuah rezim yang tidak menghormati HAM dan Demokrasi, karena tujuan ASEAN lebih banyak ditentukan oleh keinginan untuk menjamin kelangsungan hidup rezim non-demokratis. Hal ini diperparah ketika ASEAN justru menerima Myanmar menjadi anggota pada tahun 1997. Sebaliknya, jika ada kewajiban dan sanksi dan demokratisasi menjadi keharusan bagi setiap negara anggota, maka setiap anggota yang tidak menjalankan dapat dikenakan sanksi, mulai dari yang ringan yang berat. Sanksi itu bisa berupa pengucilan atau harus menarik diri dari keanggotaan. Padahal, untuk dapat terciptanya ASC, setiap negara anggota harus bersedia

menanggalkan sebagian kedaulatan nasional dan menukarkannya dengan kedaulatan bersama atau supranasional.

Namun demikian, untuk mencapai hal-hal yang diharapkan diatas, keikutsertaan ASC dalam menjaga keamanan kawasan ASEAN masih memiliki kendala atau kelemahan, seperti belum adanya sebuah komitmen bersama dari negara-negara anggota untuk mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam perwujudan dibangunnya program kerjasama ini.

Maka, upaya-upaya yang dapat dilaksanakan oleh Indonesia dan ASEAN dalam menghadapi perkembangan tersebut antara lain : 1) Meningkatkan pembangunan politik bagi negara-negara Anggota ASEAN, dalam hal ini negara-negara anggota ASEAN diwajibkan untuk memajukan politik serta mendukung pemimpin ASEAN didalam mencapai Visi bersama dan untuk mencapai perdamaian, stabilitas, demokrasi, serta kesejahteraan wilayah; 2) Membentuk dan membagi norma, hal ini bertujuan untuk mebuat standar umum atas kepatuhan terhadap norma-norma umum diantara negara anggota ASEAN, guna mengkonsolidasi, memperkuat solideritas ASEAN, serta berkontribusi terhadap pembangunan yang demokratis, toleran, dan menciptakan masyarakat yang partisipatif dan transparan; 3) Meningkatkan pencegahan konflik, mencegahan konflik ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan masyarakat, mengurangi ketegangan dan mencegah timbulnya perselisihan didalam negara anggota ASEAN maupun intra-ASEAN; 4) Secara berkala dan berlanjut mengadakan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri (mewakili pemerintah) untuk tetap mengedepankan dan memupuk rasa kebersamaan dalam memandang dan memerangi segala bentuk ancaman; 5) Walaupun setiap negara peserta memiliki latar belakang yang berbeda, namun harus mengedepankan rasa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, hal ini sangat penting karena apabila masing-masing negara merasa lebih tinggi dari negara lain maka akan mengganggu mekanisme kerjasama yang ada.

KESIMPULAN

Dari uraian singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa ASEAN sebagai suatu organisasi regional pada masa awal terbentuknya telah menyepakati adanya kerjasama keamanan antara anggota-anggotanya. Tetapi pada faktanya kerjasama keamanan tidak dapat dibentuk secara optimal dikarenakan masih adanya rasa bermusuhan dan keinginan menyerang satu sama lain dan juga prinsip non-interference yang mengakibatkan lambatnya penanganan konflik keamanan. Dengan adanya prinsip non-interference inilah yang mengakibatkan fokus kerjasama keamanan di ASEAN lebih difokuskan pada kerjasama ekonomi dan sosial budaya. Tapi setelah terjadi banyaknya aksi terorisme dan pemboman di kawasan Asia Tenggara, melalui *Bali Concord II*, dibentuklah ASC (*ASEAN Security Community*) yang merupakan manifestasi dari kepedulian bersama akan keamanan regional Asia Tenggara. Tetapi pada faktanya sejak dibentuknya ASC pada 2001 tidak dapat bertindak maksimal dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam regional, seperti masalah junta militer di Myanmar ataupun kudeta di Thailand. ASC yang masih setia dengan prinsip non-interference tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi masalah keamanan dalam regional. Keamanan kawasan memang sangatlah penting bagi ASEAN, sehingga membentuk ARF (*ASEAN Regional Forum*) yang bekerjasama dengan negara-negara yang terlingkup dalam kawasan region Asia-Pasifik. Termasuk didalamnya China dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara besar dan memiliki pengaruh yang besar juga untuk keberlangsungan ARF, terutama Amerika Serikat. Karenanya, dengan adanya negara-negara influence di dalam region, ARF harus mampu untuk menentukan sikap dan tepat dalam mengkonsolidasi kepentingan-kepentingan anggota ARF yang lain.

Dengan demikian, sebagai saran penulis yaitu Indonesia dan ASEAN sebagai penggerak utama ARF dan ASC dalam membentuk rezim keamanan, harus mengambil sikap terhadap aneka masalah tersebut. Sebagai aktor dalam ARF dan ASC, ASEAN harus melakukan konsolidasi di kalangan anggotanya dan peka terhadap perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentang masalah terorisme. Hal itu tidak perlu menjadi rintangan ASEAN dalam menyikapi aneka

perubahan di kawasan. Meski realitas menunjukkan hingga kini ARF dan ASC tidak langsung menangani masalah keamanan di Asia Pasifik dan belum menjalankan peran secara substantif, ASEAN perlu terus memperluas hubungan dan memperkuat solidaritas ARF guna mengantisipasi munculnya polarisasi dalam ARF dan ASC.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, Amitav. 2005. *Do norms and identity matter? Community and power in Southeast Asia's regional order* dalam The Pacific Review. Routledge. London

Baginda Pakpahan, Indonesia, 2018, *ASEAN dan ketidakpastian hubungan Internasional*.

Dewi Fortuna Anwar, 1993, "*Changes and Continuity In Indonesia's Regional Outlook*", dlm Chandran Jeshurun, (penyt.), Cina, India, Japan and The Security of Southeast Asia

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/29/ln/519490.htm> dalam artikel "*Pertaruhan Komunitas Keamanan ASEAN*".

Kompas (2016) "*AS Perbesar kekuatan di LCS*" Kompas Cetak, 16 Juni

Kompas (2016) "*Manusia Perlu Muka, Pohon Perlu Kulit*" Kompas Cetak, 13 Juli

Kompas (2016) "*ASEAN menyatakan keprihatinan*" Kompas Cetak, 29 Februari.

Mary Farrel, Bjorn Hette, Luk Van Langenhove. "*Regional Arrangement and Agencies For Security: Prospect and Obstacles*" dalam buku Global Politics Of Regionalism. Pluto Press, London.

Naskah Departemen MP. Kerja sama Keamanan Kawasan, Kep Danseskoad Nomor Kep/120/XII/2019 tgl 11 Desember 2019.

Ralf Emmers, 2004, "*Regimes for Cooperative Security: The Formation and Institutional Evolution of ASEAN and the ARF*" dalam buku *Cooperative Security and The Balance of Power in ASEAN and The ARF*. New York.